

JURNAL
KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PT. ASABRI)



Disusun oleh :
Fransiscus Dea Anggara Kusuma

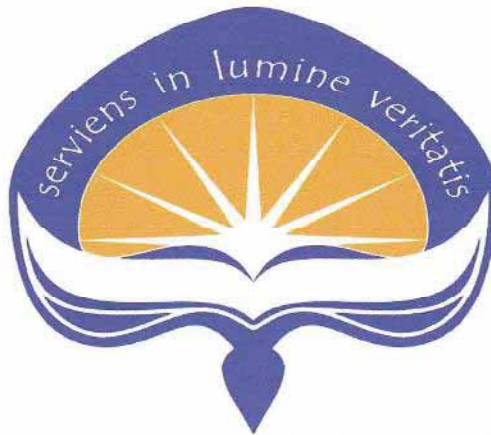
NPM : 110510743
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Studi : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PT. ASABRI)**



Diajukan oleh :

Fransiscus Dea Anggara Kusuma

NPM : 110510743

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Studi : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Tanggal : 3 Februari 2015

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Tanda tangan:

KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(STUDI KASUS PT. ASABRI)

Fransiscus Dea Anggara Kusuma, Aloysius Wisnubroto

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

Authority police and Prosecutor in police investigation corruption, UUD 1945 section 1 sub section (3) expressly that the Republic Indonesian is state law. According to the institute police forces and Prosecutor is separate and independent institution, so the impact on the implementation of the law enforcement is the overlapping of authority are even functional coordination impression in an integrated criminal justice system does not function properly, In order to avoid overlap, then the given limit each authority, police and prosecutors under 1 billion over 1 billion. Based on the above background, the formulation of the problem: How can the implementation of the police and prosecution authorities in the investigation of corruption as well as the formulation of police governing the police and prosecutors to avoid collisions. The type of study is a normative legal norms in the form legislation. Then obtained data were collected and analyzed qualitatively. In conclusion, the thought process used is deductively.

Keyword : Authority, Police, Prosecutors, Corruption.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3), secara tegas menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang menjunjung penegakan hukum dan keadilan, yang menjadi syarat mutlak untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional adalah untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi filosofi tujuan hidup masyarakat Indonesia dari

dahulu sampai saat ini. Dalam rangka mewujudkan kehidupan berbangsa, diperlukan dengan adanya kepastian hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat. Prinsip penting dari negara hukum adalah supremasi hukum yang memiliki jaminan konstitusional dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Supremasi hukum selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum.¹

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain termasuk Kepolisian dan Kejaksaan dipertegas dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan dituntut untuk berperan menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, dan pemberantasan tindak pidana tertentu termasuk korupsi.² Kepolisian mempunyai tugas pokok lainnya di antaranya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyelidikan dan

¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007.Hlm. 17.

²*Ibid.*hlm. 18.

penyidikan merupakan wewenang dari anggota Polri. Tugas penyidikan merupakan bagian dari tugas represif, dimana Kepolisian melakukan penyidikan terhadap kejahatan dan pelanggaran yang mengatur delik-delik khusus (*lex specialis*) misalnya adalah penyidikan tindak pidana korupsi.³

Kejaksaan mempunyai tugas pokok lainnya di antaranya adalah melakukan penuntutan dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewenangan mempunyai hak untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, namun disatu sisi Kejaksaan juga mempunyai landasaan yuridis dalam hal kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu termasuk tindak pidana korupsi. Secara kelembagaan, Kepolisian dan Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang terpisah dan mandiri, sehingga berdampak pada pelaksanaan penegakan hukum yaitu terjadinya tumpang tindih, *overlapping* kewenangan, dan tanggung jawab antara Kepolisian dan Kejaksaan, bahkan terdapat kesan koordinasi fungsional dalam sistem peradilan pidana terpadu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

³Indriyanto Seno Adji. *Arah Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, 2001. Hlm 5.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem dalam penegakan hukum pidana berupaya untuk menanggulangi masalah kejahatan dimaknai sebagai upaya untuk mengendalikan atau membatasi kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁴

Salah satu contoh kasus terjadinya tumpang tindih atau *Overlapping* kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan, misalnya dalam penyidikan kasus penggelapan dana PT. ASABRI/BPKPP (Badan Pengelola Kesejahteraan dan Perumahan Prajurit). Pada awalnya penyidikan dimulai dari Direktorat II/Keamanan dan Transnasional Mabes Polri. Dalam proses penyidikan yang berlangsung, Mabes Polri menetapkan agar proses penyidikan perkara penggelapan dana PT. ASABRI dihentikan (SP3) karena kurangnya bukti-bukti. Dengan diberhentikannya penyidikan oleh Mabes Polri kasus penggelapan dana PT. ASABRI, Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap Subardja Midjaja sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana PT. ASABRI/BPKPP untuk perkara yang sama, berkaitan dengan proses penyidikan penggelapan dana PT. ASABRI diatas, situasi seperti ini dinilai menimbulkan kurangnya kepastian hukum dan tidak sesuai dengan asas perlindungan hukum sebagai bagian dari perlindungan HAM. Karena dalam penanganan perkara penggelapan dana PT. ASABRI kedua lembaga antara Kepolisian dan Kejaksaan tidak ada komunikasi atau koordinasi dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi PT. ASABRI. Permasalahan ini merupakan permasalahan menahun yang perlu dikaji agar tercipta kepastian hukum dan tidak membuka peluang terjadinya benturan dalam

⁴Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Jakarta : Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum (lembaga kriminologi). 2007. Hlm 84.

penerapan hukum di lapangan. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dan adanya tumpang tindih antara kedua lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, maka dipilih judul skripsi yaitu kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi (*Studi kasus PT. Asabri*) serta kebijakan formulasi yang mengatur kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian agar tidak terjadi benturan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana kebijakan formulasi yang mengatur kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan agar tidak terjadi benturan kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi ?

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana terlebih dahulu diawali dengan suatu tahap yang disebut penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Setelah penyelidikan selesai dan penyidik berpendapat bisa diteruskan ke tahap penyidikan, maka langkah selanjutnya adalah mencari dan mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut **AKBP. Dra. Sriningsih. M.H.** (Penyidik Tipikor Mabes Polri),⁵ pelaksanaan kewenangan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan kewenangan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik tipikor Mabes Polri dalam melakukan pelaksanaan penyidikan mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi akan tetapi dalam Kepolisian sendiri diatur secara khusus dalam Keputusan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur penyelidikan dan penyidikan. Menurut **AKBP. Dra. Sriningsih. M.H** dan **Panit DITPIKOR Jenny. S.H** pelaksanaan kewenangan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi, dalam hal ini adalah pada tahap penyelidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian diawali dengan laporan mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi. Informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi yang diterima dapat diperoleh dari laporan tertulis dan laporan secara lisan. Setelah penyidik menemukan kebenaran atas laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, maka selanjutnya menuju pada tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, penyidik melakukan

⁵Sumber : Hasil Wawancara dengan AKBP.Dra.Sriningsih. M,H di Mabes Polri, Pada tanggal 28 oktober 2014.

pengumpulan alat-alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Tujuan dilakukan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti misalnya berupa rekaman hasil pembicaraan dan berupa dokumen yang dapat mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi yang disangkakan. Berdasarkan bukti-bukti dan petunjuk yang diperoleh tersebut maka Kepolisian dapat menetapkan tersangkanya.

Pada saat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, Kepolisian diwajibkan untuk mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan dan KPK untuk menghindarkan dari benturan penyidikan dengan Kejaksaan maupun dengan KPK, namun dalam prakteknya hal tersebut tidak dilakukan oleh Kepolisian sehingga menimbulkan adanya tumpang tindih dalam penyidikan tindak pidana korupsi. SPDP merupakan hal yang wajib untuk dikirimkan Kepolisian kepada Kejaksaan maupun dengan KPK agar tidak terjadi benturan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan agar lembaga penegak hukum selain kepolisian mengetahui apabila kasus atau perkara sudah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian.

Menurut **Agustinus Heri Mulyanto S.H, M.H** dan **Robertus David MS. S.H** pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik Jaksa dalam melakukan pelaksanaan penyidikan mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kebijakan formulasi yang mengatur Kepolisian dan Kejaksaan agar tidak terjadi benturan kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Menurut **AKBP. Dra Sriningsih, M.H dan Jenny. S.H** (penyidik Tipikor di Mabes Polri) agar tidak terjadi benturan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi,⁶ maka kebijakan formulasi yang mengatur kewenangan kepolisian adalah dengan melakukan koordinasi antara ketiga lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan dan KPK, melakukan gelar perkara dan mengevaluasi hasil penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri.

Pada saat melakukan kerjasama penyidikan tindak pidana korupsi di daerah lingkup kewenangan Mabes Polri, Kepolisian berkerjasama dengan Kejaksaan Agung RI, namun apabila tindak pidana korupsi melibatkan pejabat tinggi negara maka penyidikan itu langsung diambil alih oleh KPK.

⁶Sumber : Hasil wawancara dengan AKBP. Dra. Sriningsih, M.H di Mabes Polri. Pada Tanggal 28 Oktober 2014.

Sumber : Hasil wawancara dengan Jenny di Mabes Polri. Pada Tanggal 28 Oktober 2014.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Agustinus Heri Mulyanto, S.H., M.H** dan **Robertus Davis MS. S.H**, (Penyidik Tindak Pidana Korupsi) dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan agar tidak terjadi benturan dalam penyidikan tindak pidana korupsi yaitu⁷ dengan melakukan koordinasi yang rutin dan insidental agar dalam melakukan penyidikan tidak terjadi benturan antara Kepolisian dan Kejaksaan dan melihat dari sprindik atau sprindiknya lebih dahulu siapa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut, apabila Kepolisian telah mengeluarkan atau menerbitkan sprindik atau sprindik maka Kejaksaan tidak akan mengganggu kasus yang ditangani Kepolisian tersebut namun dalam praktiknya Kepolisian tidak selalu mengirim spdpr itu kepada Kejaksaan, hal tersebut yang sering menimbulkan polemik dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Untuk itu menurut narasumber hal diatas harus cepat diselesaikan agar tercipta kesinergisan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang ataupun saat ini agar tidak terjadi benturan dalam penyidikan.

Menurut **Zaenur Rohman** sebagai dengan pengamat atau ahli dibidang tindak pidana korupsi di PUKAT UGM,⁸ dalam hal ini agar tidak terjadi benturan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, meliputi :

1. Peraturan perundang-undangnya yang harus diubah, misalnya apabila memang ideal adalah kewenangan penyidikan diberikan kepada satu

⁷Sumber : Hasil Wawancara dengan Agustinus Heri Mulyanto di Kejaksaan Agung. Pada Tanggal 29 Oktober 2014.

Sumber : Hasil wawancara via.Telepon dengan Robertus Davis MS. Pada Tanggal 29 Oktober 2014.

⁸Sumber : Hasil Wawancara dengan Zaenur Rohman di PUKAT Korupsi. Universitas Gadjah Mada. Fakultas Hukum. Pada Tanggal 11 November 2014.

lembaga penegak hukum, akan tetapi hal tersebut terjadi apabila bangsa Indonesia ini benar-benar dipandang sudah berhasil dalam menekan tindak pidana korupsi atau benar-benar sudah berhasil dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan membaiknya indeks persepsi korupsi. Dilakukan koordinasi antara Kepolisian dan Kejaksaan, bentuknya adalah SPDP, tujuannya adalah agar para pengak hukum lainnya tahu bahwa kasus ini sedang ditangani kepolisian ataupun Kejaksaan.

2. Komitmen lembaga penegak hukum pada MOU dan melaksanakan atau memaksimalkan komitmen pada MOU (*Memorandum Of Understanding*).

Berdasarkan Kesepakatan bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam Pasal 7 dan Pasal 8 sesuai yang dikemukakan oleh narasumber **Zaenur Rohman** diatas, penulis berpandangan bahwa optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan atau ditingkatkan serta berkomitmen pada kesepakatan bersama dengan melakukan koordinasi tingkat pimpinan yang diadalkan atau dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan dapat mengikutsertakan Kepala Kejaksaan Tinggi dan/atau Kepolisian Daerah, untuk mengoptimalkan kecepatan dan hasil penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi baik tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dalam hal melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti

penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan SPDP ke masing-masing lembaga penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih atau benturan dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh salah satu lembaga penegak hukum dapat dialihkan ke lembaga penegak hukum yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing kewenangan lembaga penegak hukum sesuai yang dikemukakan oleh penulis diatas, dengan melakukan gelar perkara yang dihadiri oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan dari penulis yang berupa pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB I, BAB II dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mencari jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi (Studi kasus PT. Asabri) adalah dalam pelaksanaan kewenangan, Kepolisian dalam praktiknya penyidikan mendasarkan juga dengan Keputusan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, disatu sisi Kejaksaan dalam pelaksanaan kewenangan, mendasarkan juga dengan Perja-039/A/JA/10/2010. Kepolisian dan Kejaksaan adalah merupakan institusi yang berbeda namun

sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi maka terdapat pembagaian kewenangan antara kedua lembaga penegak hukum tersebut, dimana apabila menyakut kerugian negara di bawah Rp. 1.000.000.000,00 kewenangan Kepolisian, akan tetapi apabila paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 merupakan kewenangan Kejaksaan.

2. Kebijakan formulasi yang mengatur Kepolisian dan Kejaksaan agar tidak terjadi benturan dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah formulasi kedepan harus dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan dan melakukan koordinasi, gelar perkara dengan lembaga lainnya khususnya dalam menangani tindak pidana khusus dan memberikan batasan-batasan kewenangan yang nilai kerugiannya di bawah Rp. 1.000.000.000,00 merupakan kewenangan Kepolisian dan apabila paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 maka merupakan kewenangan Kejaksaan, tujuannya adalah agar mengetahui batasan masing-masing kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan tidak terjadi benturan atau tumpang tindih dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

SARAN

Setelah menyampaikan kesimpulan tentang Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, penulis menyampaikan saran yang dapat menjadikan masukan bagi Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan antara Kepolisian dan Kejaksaan lebih ditingkatkan lagi untuk melakukan penyidikan tindak pidana, khususnya

penyidikan tindak pidana korupsi dengan diperlukannya koordinasi dan kerjasama antara Kejaksaan dan Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum, sehingga pelaksanaan kewenangan penyidikan tercipta penanganan yang optimal, jujur, adil dan bersih dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

2. Peraturan Perundang-undangan diubah agar tidak terjadi benturan dalam penyidikan tindak pidana korupsi antar lembaga penegak hukum, namun hal ini dimungkinkan terjadi apabila bangsa Indonesia mampu dipandang benar-benar menekan dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dengan membaiknya indeks persepsi korupsi. Perlu dilakukan kerjasama, koordinasi dan gelar perkara antara Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan KPK sesuai dengan kewenangannya masing-masing serta berkomitmen lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugas atau memaksimalkan komitmen pada MOU (*Memorandum Of Understanding*), sehingga tidak terjadi penyimpangan dan benturan dalam kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Daftar pustaka

Buku-buku :

Indriyanto Seno Adji. *Arah Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, 2001

Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Jakarta : Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum (lembaga kriminologi). 2007

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007.